

TANTANGAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI WILAYAH 3T INDONESIA

Nurul Nisa¹, Yan Dirk Wabiser²,

Lusia N. Amsad³

¹FKIP, Universitas Cenderawasih,

²FKIP, Universitas Cenderawasih,

³FKIP, Universitas Cenderawasih,

¹nurulnisa0798@gmail.com,

ABSTRACT

Equitable education is a constitutional mandate and a development agenda that demands equal access and quality education services throughout Indonesia. However, the Disadvantaged, Frontier, and Outermost (3T) regions still face structural gaps: limited school infrastructure and connectivity, unequal distribution and professional development of teachers, disparities in access to learning technology, and challenges in curriculum relevance to local contexts. This article aims to analyze the challenges of equitable education in the 3T regions in the 2020–2025 period through a semi-systematic literature review. Data sources include accredited national journals (SINTA) and reputable national journals, international articles indexed/standardized by Scopus and international sources, and policy reports from official institutions (UNICEF, OECD, World Bank). The study results show that the post-pandemic digital acceleration opens up opportunities for innovation, but also widens the digital divide without the support of infrastructure, digital literacy, and sustainable affirmative policy design. This article recommends four policy directions: (1) meeting minimum service standards for infrastructure and connectivity, (2) affirming teacher placement and strengthening competencies, (3) strengthening an inclusive digital learning ecosystem, and (4) developing a contextual curriculum based on local needs and learning recovery.

Keywords: educational equity; 3T regions; digital divide; teachers; education policy; learning recovery

ABSTRAK

Pemerataan pendidikan merupakan amanat konstitusi sekaligus agenda pembangunan yang menuntut akses dan layanan pendidikan berkualitas yang setara di seluruh Indonesia. Namun, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menghadapi kesenjangan struktural: keterbatasan infrastruktur dan konektivitas sekolah, ketimpangan distribusi serta pengembangan profesional guru, disparitas akses terhadap teknologi pembelajaran, serta tantangan relevansi kurikulum dengan konteks lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T pada periode 2020–2025 melalui tinjauan

literatur semi-sistematis. Sumber data meliputi jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal nasional bereputasi, artikel internasional terindeks/berstandar Scopus dan sumber internasional, serta laporan kebijakan dari lembaga resmi (UNICEF, OECD, Bank Dunia). Hasil kajian menunjukkan bahwa akselerasi digital pascapandemi membuka peluang inovasi, namun juga memperlebar kesenjangan digital tanpa dukungan infrastruktur, literasi digital, dan desain kebijakan afirmatif yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan empat arah kebijakan: (1) pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur dan konektivitas, (2) afirmasi penempatan guru dan penguatan kompetensi, (3) penguatan ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, dan (4) pengembangan kurikulum kontekstual berbasis kebutuhan lokal serta pemulihan pembelajaran.

Kata kunci: pemerataan pendidikan; wilayah 3T; kesenjangan digital; guru; kebijakan pendidikan; pemulihan pembelajaran

A. Pendahuluan

Pemerataan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai perluasan akses, tetapi juga penyediaan mutu layanan yang setara antar wilayah. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendidikan cenderung menguat pada wilayah 3T yang memiliki hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, serta biaya logistik layanan publik yang lebih tinggi. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang mengungkap keterbatasan sistem pembelajaran jarak jauh dan memperlihatkan jurang akses teknologi antara wilayah urban dan wilayah terpencil (Falah & Hadna, 2022; UNICEF, 2022). Sejumlah studi nasional menegaskan bahwa problem pemerataan di wilayah 3T bersifat multidimensi, mencakup kondisi fisik sekolah dan akses internet, ketersediaan dan

kompetensi guru, keterbatasan bahan ajar dan sumber belajar, serta kesesuaian kurikulum dengan konteks lokal (Widodo, 2020; Ramadani, 2024; Ananda, 2025). Di tingkat global, lembaga seperti World Bank dan OECD menekankan bahwa krisis pembelajaran pasca pandemi berpotensi memperlebar ketimpangan apabila kebijakan pemulihan tidak menempatkan kelompok rentan dan wilayah tertinggal sebagai prioritas (World Bank, 2021; OECD, 2024).

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini meninjau literatur periode 2020–2025 untuk merangkum tantangan kunci pemerataan pendidikan di wilayah 3T serta mengkaji implikasi kebijakan yang dapat diambil. Fokus pembahasan dikelompokkan ke dalam empat tema: (1) infrastruktur dan akses

layanan, (2) distribusi serta pengembangan profesional guru, (3) kesenjangan teknologi dan pembelajaran digital, dan (4) relevansi kurikulum, pedagogi, serta pemulihan pembelajaran.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur semi sistematis. Pencarian sumber dilakukan pada periode 2020–2025 melalui repositori jurnal nasional (termasuk jurnal terakreditasi SINTA), portal jurnal perguruan tinggi, serta basis data dan repositori internasional terbuka. Kata kunci yang digunakan meliputi “pendidikan 3T”, “pemerataan pendidikan”, “digital divide”, “rural/remote education”, “teacher distribution”, dan “learning recovery”. Kriteria inklusi: (a) publikasi 2020–2025, (b) relevan dengan akses dan mutu pendidikan wilayah terpencil/3T, (c) tersedia tautan resmi (landing page) dan/atau PDF. Kriteria eksklusi: (a) opini tanpa data, (b) artikel yang tidak memiliki informasi bibliografis jelas, (c) publikasi di luar rentang tahun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Infrastruktur Sekolah dan Akses Layanan Dasar

Literatur 2020–2025 menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur sekolah masih menjadi penghambat utama pemerataan pendidikan di wilayah 3T. Masalah mencakup kondisi bangunan yang tidak layak, keterbatasan sanitasi, akses air bersih, listrik, serta jauhnya jarak tempuh ke sekolah. Pada masa pandemi, keterbatasan infrastruktur beririsan dengan rendahnya konektivitas sehingga pembelajaran jarak jauh sulit dijalankan (Falah & Hadna, 2022; UNICEF, 2021). Kebijakan daerah yang berupaya memperkuat pemerataan mutu umumnya menghadapi kendala pembiayaan, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas implementasi (Ramadani, 2024).

Implikasi kebijakan yang sering muncul adalah perlunya pemenuhan standar layanan minimum sarana-prasarana sekaligus investasi konektivitas di sekolah terpencil. UNICEF (2021) menekankan bahwa kualitas pembelajaran digital sangat dipengaruhi lebar pita, ketersediaan perangkat, serta dukungan ekosistem (guru, orang tua, dan sekolah). Karena itu, pembangunan

infrastruktur fisik dan digital perlu dirancang sebagai satu paket kebijakan afirmatif.

Distribusi, Kesejahteraan, dan Kompetensi Guru

Ketimpangan distribusi guru dan akses pengembangan profesional menjadi isu berulang pada wilayah 3T. Studi kebijakan menegaskan bahwa program pemerataan membutuhkan strategi penempatan, insentif yang memadai, serta dukungan supervisi dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan (Widodo, 2020). Dalam konteks pascapandemi, kompetensi pedagogik digital menjadi semakin penting karena guru perlu mengelola pembelajaran campuran (luring-daring) dan memanfaatkan sumber belajar digital secara efektif.

Penelitian tentang peningkatan literasi digital melalui pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan yang berbasis kebutuhan lokal dan pendampingan praktik dapat membantu guru di wilayah terpencil meningkatkan keterampilan digital (Wijaksono, 2023). Temuan internasional juga menguatkan bahwa kompetensi digital guru di wilayah rural berperan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan,

namun membutuhkan dukungan kebijakan, pelatihan, dan pendampingan yang konsisten (Fernandez-Arias dkk., 2025).

Kesenjangan Digital dan Pembelajaran Berbasis Teknologi

Kesenjangan digital (digital divide) di pendidikan mencakup akses (perangkat dan internet), kompetensi (literasi digital), dan pemanfaatan (kemampuan menggunakan teknologi untuk belajar). Pada konteks Indonesia, studi literatur dan artikel konseptual menunjukkan bahwa perbedaan akses internet dan perangkat di wilayah terpencil berimplikasi pada ketidaksetaraan kesempatan belajar (Sinambela, 2024; Farhatin, 2025). UNICEF (2022) juga menegaskan dampak pandemi terhadap pembelajaran dan perlunya strategi pemulihan yang mempertimbangkan kelompok rentan, termasuk anak di wilayah terpencil.

Dari perspektif kebijakan global, (World Bank, UNESCO, 2021) menguraikan bahwa kehilangan pembelajaran (learning loss) dapat menjadi permanen apabila tidak ada pemulihan terarah, dan ketimpangan akan meningkat karena keluarga dan sekolah yang memiliki sumber daya

lebih mampu beradaptasi. OECD (2024) menunjukkan pentingnya reformasi yang menekankan literasi-numerasi dasar, otonomi sekolah, dan dukungan implementasi agar kebijakan menyentuh sekolah yang paling tertinggal.

Relevansi Kurikulum, Kontekstualisasi, dan Pemulihan Pembelajaran

Selain faktor input (infrastruktur dan guru), pemerataan juga ditentukan oleh relevansi kurikulum dan kualitas proses pembelajaran. Literatur menyoroti bahwa sekolah di wilayah 3T membutuhkan pendekatan kontekstual mengaitkan materi dengan lingkungan sosial budaya setempat untuk meningkatkan keterlibatan dan makna belajar (Ananda, 2025). Pada saat yang sama, pemulihan pembelajaran pascapandemi menuntut asesmen diagnostik, penguatan literasi-numerasi, serta strategi remediasi yang realistis bagi sekolah dengan keterbatasan sumber daya (UNICEF, 2022; World Bank, 2021).

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Paket afirmasi infrastruktur fisik-digital: perbaikan ruang kelas,

sanitasi, listrik, dan konektivitas sekolah sebagai satu paket layanan minimum, dengan prioritas wilayah 3T. Strategi guru 3T berbasis karier: rekrutmen dan penempatan afirmatif, insentif berbasis beban wilayah, serta skema pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pelatihan pedagogik digital dan pendampingan.

Ekosistem pembelajaran digital inklusif: penyediaan perangkat bersama (shared devices), konten offline/low-bandwidth, serta dukungan literasi digital bagi guru, siswa, dan orang tua. Pemulihan pembelajaran kontekstual: asesmen diagnostik, fokus literasi-numerasi, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal (kearifan lokal/lingkungan sekitar). Tata kelola kolaboratif: penguatan koordinasi pusat-daerah dan kolaborasi multipihak (komunitas, dunia usaha, lembaga sosial) untuk keberlanjutan intervensi.

D. Kesimpulan

Tinjauan literatur 2020–2025 menunjukkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan di wilayah 3T bersifat saling terkait antara infrastruktur, guru, kesenjangan

digital, serta relevansi kurikulum dan strategi pemulihan pembelajaran. Percepatan digital pascapandemi membuka peluang inovasi, tetapi tanpa dukungan infrastruktur dan kompetensi, jurang ketimpangan berpotensi melebar. Karena itu, kebijakan afirmatif yang terintegrasi, kontekstual, dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di wilayah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, R., & Yarrow, N. (2021). Rewrite the future: How Indonesia's education system can overcome the losses from the COVID-19 pandemic and raise learning outcomes for all. *The World's Bank, September*, 1–26.
- Alfariq Ramadani, & Putri, R. P. (2024). Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 10(1), 40–49. <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.13523>
- Chitrangna Dewan, N. K. M. V. R. K. dan S. J. (2021). *Daftar Isi*.
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164–185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Farhatin. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 1494–1502. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Fernández-Arias, P., Sánchez-Jiménez, M., Antón-Sancho, Á., Nieto-Sobrino, M., & Vergara, D. (2025). Digital Competence of Rural Teachers in Depopulated Regions of Spain: A Bibliometric Review. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 15(1). <https://doi.org/10.3390/ejihpe15010005>
- OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Geography of Opportunities Policy Highlights Rural Well-being. *OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development*, 1–20. https://www.oecd.org/regional/rural-development/PH_Rural-Well-Being.pdf
- OECD Education Policy Perspectives. (2023). Transforming Education in Indonesia: Examining the landscape of current reforms. *Directorate for Education and Skills*, 88, 1–22. <https://www.oecd.org/pisa/data/2022database>
- Redaksi, D. (2020). *J u r n a l penelitian k ebijak an pendidikan*.

13.

Sezgin, S., & Fırat, M. (2024). Exploring the Digital Divide in Open Education: A Comparative Analysis of Undergraduate Students. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 25(1), 109–126.

<https://doi.org/10.19173/irrodl.v25i1.7236>

Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin, J. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24. <https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003>

UNICEF Indonesia. (2022). *The Impact of the COVID-19 Pandemic on Children's Learning in Indonesia ISSUE BRIEF*. 0–18.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-proses-pembelajaran>

World Bank, UNESCO, & U. (2021). The State of the Global Education Crisis. In *International Bank for Reconstruction and Development*.

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36744>